

## Mogok, Protes, dan Keadilan

Oleh Faturochman\*

Perjuangan buruh untuk memperbaiki nasibnya telah sampai pada fase protes keras. Hal ini tampak pada aktivitas protes yang tidak lagi bentuk mogok, tetapi demonstrasi yang mengarah pada perusakan. Bila dibiarkan terus, tentunya akan mengakibatkan hal-hal yang lebih buruk lagi. Kasus di Medan yang masih hangat itu adalah contoh yang sangat jelas.

Gerakan buruh dalam berbagai bentuknya merupakan fenomena yang terjadi dimana-mana dan dalam waktu yang telah begitu lama. Tujuannya hampir sama, yaitu peningkatan kesejahteraan. Dan berbicara kesejahteraan buruh, meskipun tampak sederhana, kaitannya banyak sekali. Hal ini disebabkan oleh dua hal pokok. Pertama, istilah buruh itu sendiri sudah menyiratkan kelompok yang tingkat kesejahteraannya pada lapis bawah. Pada kenyatannya tentu saja, tidak selamanya demikian.

Kedua, kesejahteraan itu sendiri tidak pernah berhenti pada satu titik, akan tetapi meningkat terus. Saking sulitnya untuk menentukan peningkatan itu, orang lebih suka melihatnya dalam konteks waktu. Kesejahteraan hari ini, kesejahteraan kemarin, dan esok hari.

### Kebutuhan Dasar

Berbeda dengan gerakan buruh di negara-negara maju, di Indonesia yang diperjuangkan tampaknya masih kesejahteraan dasar. Istilah-istilah untuk ini antara lain memperjuangkan upah sesuai KFM (Kebutuhan Fisik Minimum). Betapa tidak? Upah minimumnya saja masih dibawah KFM. Sedangkan sejahtera tidak hanya sebatas itu. Orang awam bilang kalau sejahtera paling tidak terpenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, dan transportasi.

Melihat situasi yang demikian tentu saja bisa dimaklumi bila buruh suka protes. Namun, masalah yang ada tidak hanya itu. Dulu, sebagian industri masih "megap-megap" untuk bisa bertahan; keuntungan dinilai kecil. Bila harus membayar buruh dengan upah mahal, nanti rugi. Buruh malah bisa di-PHK untuk rasionalisasi.

Sekarang, banyak perusahaan untung besar. Buktinya, banyak yang *go public* yang menyaratkan kinerja bagus dan keuntungan besar. Mengapa masih memberi upah rendah?

Beberapa alasan tampaknya sudah dikemukakan. Ongkos produksi masih tinggi. Bila upah buruh dinaikkan biaya itu makin tinggi. Dimana pos yang menyebabkan biaya tinggi? Uang siluman dan sejenisnya adalah alasan yang sering terdengar.

Ada juga yang berpendapat, bila upah dinaikkan perekonomian akan menjadi panas. Harga-harga akan ikut naik. Pegawai negeri dan petani tertinggal. Mereka pun minta diberi kesempatan menaikkan pendapatan. Karena waktunya tidak sama, begitu dinaikkan harga-harga naik lagi. Jika bersamaan kenaikannya, bisa jadi *over heated*.

Banyaknya tenaga kerja, bisa pula mendorong keberanian pengusaha memperlakukan buruh begitu. Meskipun proses rekrutmen dikontrol kuat oleh Departemen Tenaga Kerja dan SBSI, nyatanya kekuatan pengusaha masih cukup untuk memperlakukan buruh secara tidak adil.

Alasan lain masih ada. Misalnya untuk menarik investor asing. Ada juga alasan politis yang tidak pernah dijelaskan kepada buruh.

### **Upah yang Adil**

Posisi pengusaha yang kuat dan buruh yang lemah, bisa jadi merupakan awal dari protes buruh seperti yang sekarang terjadi. Kesadaran mereka akan posisi itu, menyebabkan mereka berpikir bagaimana caranya untuk mengubah posisi itu. Terjadilah proses pemberdayaan. Bahwa protes itu atas campur tangan pihak luar atau karena mereka sendiri yang bangkit, tampaknya tidak menarik lagi untuk dipermasalahkan. Mengapa? Mereka saat ini sudah tahu masalahnya sendiri. Latar belakang mereka, status pendidikan yang tidak begitu rendah, merupakan modal yang tidak bisa dievaluasi terus. Mereka pasti akan maju terus memperjuangkan nasibnya. Bahwa bentuknya tidak seperti sekarang, itu persoalan lain.

Kesadaran akan posisi ini membuat mereka kemudian mulai sadar akan perlakuan-perlakuan yang dikenakan pada mereka. Keadilan dianggap sebagai masalah penting sekarang. Sekedar dapat makan telah terbukti membuat mereka tidak bisa terus bertahan. Anggapan seperti itu telah membuat mereka terus menerus diperlakukan tidak adil.

Tampaknya keadilan yang sekarang dituntut adalah keadilan dalam distribusi upah. Pemberian upah yang rendah itu dinilai tidak adil karena beberapa pertimbangan. Dibanding pos lain untuk produksi, persentase upah pekerja dinilai oleh beberapa kalangan terlalu kecil. Ada yang memperkirakan rata-rata sekitar 5 persen. Angka ini jauh dibawah pos publikasi (iklan) produk. Hal seperti ini tentu mudah diketahui oleh pekerja. Seorang pekerja di pabrik sepatu pernah mengeluh: "gaji saya sebulan hanya separo harga sepasang sepatu yang saya buat".

Mereka pun melek dengan keuntungan yang diperoleh perusahaan. Sebagian besar keuntungan masuk ke perusahaan untuk pengembangan usaha. Sebagian lagi memang dibagi ke pemilik saham. Karyawan yang punya saham sangat kecil jumlahnya tentu tidak akan merasakan keuntungan itu. Mendapatkan tunjangan hari raya pun perlu perjuangan yang tidak enteng. Perlu pakai mogok juga.

### **Keadilan Lain**

Apakah buruh akan berhenti mogok bila upah dinaikkan? Untuk sementara waktu tampaknya akan berhenti. Namun tuntutan tentang keadilan bukan hanya distribusi upah. Di negara-negara maju tuntutan mogok sudah beralih. Di Hong Kong (lihat laporan Leung dkk, 1993) ternyata tuntutan buruh tidak diprioritaskan untuk menaikkan upah. Mereka menuntut hubungan antara majikan dengan buruh yang *fair*. Dengan kata lain, permasalahannya adalah *interactional justice*.

Tuntutan para pekerja Indonesia saat ini juga ada unsur keadilan interaksi. Sebab, pemberian upah yang rendah itu juga menyiratkan perlakuan yang tidak baik. Betapa tidak, pengusaha yang memberi upah rendah berarti kurang respek dengan pekerja dan peraturan tentang upah. Pekerja yang memiliki berbagai kebutuhan tidak bisa mencukupinya. Padahal waktunya sudah sedemikian banyak dicurahkan untuk perusahaan. Begitu juga pelanggaran terhadap peraturan upah. Seperti sudah disebutkan, masih ada perusahaan yang memberi upah dibawah upah minimal yang sebenarnya masih terlalu kecil.

Perlakuan perusahaan terhadap buruh makin hari makin banyak catatan hitamnya. Pemberhentian hubungan kerja adalah cerita biasa. Ancaman, penyiksaan, dan pembunuhan juga sudah sering terjadi. Marsinah adalah salah satu korban yang tercatat dengan baik. Namun merebaknya kasus itu sendiri merupakan puncak dari perlakuan perusahaan yang tidak bisa ditolerir lagi.

Perusahaan juga banyak yang tidak jujur dan terbuka terhadap karyawannya. Indikasinya antara lain adalah tidak mau membentuk serikat kerja setempat. Dalam menangani perselisihan, perusahaan juga cenderung tidak sabar dan tidak bijak. Permintaan bantuan kepada pihak keamanan sudah sangat sering dilakukan. Pihak ketiga ini kemudian membela perusahaan; akibatnya bisa lebih buruk lagi bagi karyawan.

Melibatkan karyawan dalam pengambilan keputusan perusahaan barangkali cita-cita yang masih jauh. Secara psikologis kebutuhan akan keadilan prosedural seperti ini memang lebih tinggi hirarkinya dibanding keadilan distributif dan interaksi. Namun perlu dicatat bahwa di negara lain tuntutan untuk ini sudah banyak terjadi. Salah satu penelitian di Amerika (Shapiro dan Brett, 1989) yang meliputi tiga negara bagian menyebutkan bahwa tuntutan terpenting dari pemogokan buruh adalah keadilan prosedural.

Melibatkan buruh memang bukan masalah yang mudah. Mereka sering dianggap menghambat. Padahal di Jepang perusahaan maju karena mereka terlibat secara mendalam dalam pengambilan keputusan sebagaimana dalam proses produksi. Di negeri itu hal seperti ini hanya dianggap sebagai syarat yang tidak perlu dipenuhi. Kalau pun ada usaha kesana sering tidak berguna karena mereka tidak berdaya. Atau, mereka memang dibuat impoten.

### **Catatan Akhir**

Gerakan buruh sering dicap negatif oleh penguasa. Bentuk perilaku massa memang mengerikan bagi sebagian orang. Bila yang melihat adalah orang yang diluar massa itu, sering memberi atribut mereka jelek. Hal ini bisa dimengerti karena sebagian perilaku mereka ada yang destruktif.

Namun, masalahnya bukan itu sebenarnya. Ini adalah gerakan suatu kelompok. Kelompok diluar itu mudah terkena akibat buruknya. Sama buruknya dengan orang yang terkena peluru nyrasar dalam suatu latihan perang. Bahwa mereka tidak perlu latihan seperti itu, memang benar. Namun penderitaan yang selama ini dirasakan perlu juga mendapat empati. Lagi pula, setiap orang yang terlibat akan sulit untuk menilai bahwa itu buruk. Contohnya bila kita ikut pawai kampanye dan melanggar peraturan lalu lintas. Kita tidak merasa berdosa. Sementara partai, termasuk pemerintah, tidak mempersoalkannya.

Semua akan setuju bila tindakan yang destruktif harus segera dihentikan. Namun ada dua pertanyaan penting yang masih perlu dijawab. Pertama, bila mereka berhenti berbuat itu sementara penyebabnya tidak dibenahi, efektifkah tindakan itu? Kedua, penyelesaian segera memang diperlukan, tetapi penilaian dan pengambilan tindakan yang tergesa-gesa apakah akan membuahkan hasil yang baik?

\* **Drs. Faturochman, MA.**, dosen Fakultas Psikologi dan peneliti pada Puslit Kependudukan UGM.